

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Benny Simatupang¹, Marto Silalahi², Arvita Netty Sihaloho³, Mustafa Ginting⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah kabupaten serdang bedagai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) questioner/angket dan (4) dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Hasil analisis sector unggulan di sergai sangat membawa dampak positif bagi perubahan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya perusahaan banyak sarana pendidikan yang dulunya tidak ada sekarang. Terjadi peningkatan intensitas interaksi antara sebelum dan sesudah adanya perusahaan, peningkatan yang terjadi sangat besar sehingga dapat disimpulkan tingkat interaksi masyarakat di sergai sangat baik. Tingkat gotong royong di sergai mengalami penurunan yang sangat besar, ketika sebelum adanya perusahaan masyarakat sekitar selalu mengadakan gotong royong. Namun setelah adanya perusahaan masyarakat menjadi jarang melakukan gotong royong jadi dalam hal ini perusahaan membawa dampak negatif terhadap tingkat gotong royong di sergai. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat disekitarnya serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, disamping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah, kebijaksanaan pemerintah menentukan variasi sumber - sumber pendapatn yang muncul dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari sektor unggulan tersebut.

Kata Kunci : Sektor Unggulan, Perekomian, Pembangunan Wilayah

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the leading sector level in improving the economy and regional development of Serdang Bedagai Regency. The research method used in this study is a quantitative method. While the techniques used in data collection are: (1) observation, (2) interviews, (3) questionnaires and (4) documentation. Furthermore, the data analysis technique used is quantitative analysis. The results of the leading sector analysis are believed to have a very positive impact on social change and improving the community's economy. This is proven by the presence of many educational facilities that previously did not exist today. There was an increase in the intensity of interaction between before and after the existence of the company, the increase that occurred was very large so that it can be concluded that the level of community interaction in Sergai was very good. The level of gotong royong in Sergai has experienced a very large decrease, when before the existence of the company the surrounding community always held mutual cooperation. However, after the existence of the company, the community rarely carried out mutual cooperation, so in this case the company had a negative impact on the level of mutual cooperation in Sergai. Plantation-based agricultural development aims to improve the welfare of the community so that there is a change in the lifestyle of the surrounding community and eliminate poverty and underdevelopment, especially in rural areas, besides that it also pays attention to economic equity between groups and between

regions, government policies determine variations in sources of income. emerging and the ability of the community to benefit from these leading sectors.

Keywords: Leading Sector, Economy, Regional Development

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. (Sihombing, 2005) sangat wajar apabila masyarakat mempertanyakan hasil pembangunan yang terjadi, terutama apabila hasil-hasil pembangunan itu tidak menjangkau dan bahkan apabila menimbulkan malapetaka ataupun ancaman bagi mereka.

Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif, oleh sebab itu sangat diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan. Paradigma mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dikatakan berhasil bila pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah relatif tinggi. Pertumbuhan suatu sektor perekonomian yang terjadi di suatu wilayah akan berdampak tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga di wilayah lainnya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Otonomi daerah direalisasikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing - masing. Latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatnya tuntutan daerah, dan kemungkinan disintegrasi bangsa.

Akibat dari kesalahan kebijakan pembangunan dimasa lalu yang terlalu menekankan kepada pentingnya pertumbuhan ekonomi, maka penterjemahannya dalam pembangunan spasial. Prioritas pembangunan didasarkan kepada limpahan sumberdaya dari daerah yang unggul, tetapi dengan mengikuti arah kebijakan yang telah lalu maka prioritas pembangunan wilayah sering ditekankan untuk mendahulukan kepada wilayah yang mempunyai potensi keunggulan alami yang paling menjanjikan (baik dari segi demografi, limpahan sumberdaya alam maupun lokalisional), sehingga sebagai akibatnya terjadi disparitas tingkat pembangunan ekonomi yang terus semakin melebar, sampai menjadi penyebab utama timbulnya beberapa krisis yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, kebijakan pembangunan tersebut menghasilkan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin mencolok antar wilayah - wilayah. Disparitas merupakan pencerminan yang dapat berbentuk dalam berbagai dimensi pada masyarakat (Anwar, 2005). Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil - hasil produksi di perdesaan.

Salah satu aspek yang mengalami perubahan dalam proses pembangunan adalah aspek fisik wilayah. Pembangunan wilayah merupakan pembangun ekonomi dengan mempertimbangkan variabel tempat dan waktu. Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Indonesia beragam memberikan berbagai potensi wilayah berbeda. Perbedaan potensi wilayah di Indonesia menyebabkan kesenjangan yaitu: kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar desa dan kota kesenjangan antara golongan pendapatan (Nindyantoro, 2004). Pendekatan makro yang meliputi penetapan sektor unggulan utama (*basic sector*) sebagai faktor pemicu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, penetapan sektor unggulan penunjang sebagai sektor yang berfungsi mendukung perkembangan dan keberlangsungan terhadap sektor unggulan utama, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan penetapan sektor pendukung (*non basic sector*) sebagai sektor yang berfungsi mendorong dan memperlancar sektor unggulan tersebut.

Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka pembangunan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan bidang ekonomi khususnya sektor unggulan adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan demikian dapat tercipta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.

Setiap Kabupaten harus mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya dengan sektor unggulan yang ada di daerahnya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama - sama dengan masyarakat daerah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah 1.900,22 Km² terdiri atas 243 desa / kelurahan yang berada dalam 17 kecamatan. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi

sumberdaya alam (SDA) yang besar, walaupun tidak mempunyai pendapatan dari subsektor migas (minyak bumi dan gas alam).

Pertumbuhan wilayah ini merupakan salah satu penghasil produk-produk perkebunan di Provinsi Sumatera Utara, memiliki sekitar 157.070,3 ha perkebunan karet pola swadaya, memiliki sekitar 111.676,2 ha kelapa sawit dan memiliki sekitar 3.225,5 ha kakao. Indikator makro ekonomi yang sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Secara umum seluruh sektor perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pertumbuhan. Dari Tabel 1 dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serdang Bedagai yang selalu meningkat. Lima sektor perekonomian yang memiliki nilai PDRB tertinggi pada tahun 2002 - 2006 adalah sektor pertanian, sektor jasa, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan sektor pertambangan dan penggalian. Total nilai PDRB pada tahun 2006 berdasarkan harga konstan kelima sektor tersebut berturut-turut adalah: sekitar 1.223.751 juta rupiah; 200.716 juta rupiah; 172.538 juta rupiah; 163.757 juta rupiah; 148.242 juta rupiah. Atas sumbangannya terhadap PDRB berturut-turut sebesar 58,03 persen, 9,52 persen, 8,18 persen, 7,77 persen, dan 7,03 persen.

Kabupaten Serdang Bedagai yang mempunyai sektor dominan di sektor non migas membuat Kabupaten Serdang Bedagai berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang berpotensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sumberdaya alam migas. Pengembangan sektor basis merupakan kebijakan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, karena sektor basis merupakan sektor yang dapat dipasarkan keluar batas perekonomian wilayah produksi setelah sektor tersebut memenuhi kebutuhan dalam wilayah sendiri. Pemilihan dan prioritas pengembangannya dengan pertimbangan bahwa sektor basis dengan efek pengganda pendapatannya dapat menentukan peningkatan pendapatan suatu daerah. Selain itu, peningkatan terhadap sektor basis akan mendorong pengembangan sektor bukan basis, sehingga pada akhirnya akan terjadi peningkatan perekonomian suatu wilayah.

Sebagian besar kegiatan perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan di Kabupaten terpusat pada suatu wilayah yang dekat dengan ibukota kabupaten. Adanya pemusatan tersebut menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk ke wilayah tersebut karena ketersediaan lapangan kerja dan kemudahan akses pelayanan di dekat pusat pelayanan sehingga kepadatan penduduk di wilayah itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di kabupaten.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa kegiatan perekonomian kabupaten belum memperhatikan faktor lokasi, padahal faktor lokasi sangat penting dalam mengalokasikan sumberdaya dan dana pembangunan daerah yang terbatas.

METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam studi penelitian ini secara umum terdiri atas tiga metode, yaitu: analisis pola pertumbuhan sektor ekonomi (*Klassen Typologi*), analisis *Location Quotient*, dan *analisis skalogram*. Pengolahan data dari ketiga metode / alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai

Analisis *Location Quotient* merupakan suatu ukuran untuk menentukan sektor basis atau non basis dalam suatu wilayah dengan membandingkan sektor perekonomian di tingkat bawah dengan perekonomian di tingkat atasnya. Jika nilai LQ suatu sektor lebih besar dari satu maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang dapat melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan, yang dapat diprioritaskan sebagai sektor unggulan. Jika nilai LQ suatu sektor lebih kecil dari satu maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis yang hanya dapat melayani pasar di daerah tersebut. Penentuan sektor unggulan sangat penting bagi pemerintah karena dapat digunakan sebagai barometer untuk menentukan sektor yang menjadi unggulan dan yang di prioritaskan dalam pembangunan wilayah untuk periode selanjutnya.

Analisis LQ yang dilakukan dalam pembahasan penelitian ini diperlukan untuk menentukan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Penentuan sektor unggulan ini supaya Kabupaten Serdang Bedagai khususnya Pemerintah Daerah untuk lebih dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Serdang Bedagai. Sektor unggulan atau sektor yang berpotensi dalam perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai dapat diketahui dan dapat dikembangkan, karena mampu melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan yang tentunya akan mendapatkan surplus dari perkembangan sektor unggulan ini.

Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh sektor perekonomian berdasarkan indikator pendapatan daerah yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2000 terdapat dua sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan pada tahun 2011-2015 yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, ini ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai LQ sektor tersebut lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian dan pembangunan wilayah di Kabupaten Serdang Bedagai.

Sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang mampu menjadi sektor basis di Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun 2011 - 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif dan nilai kontribusi yang besar dalam perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai. Karena kedua sektor ini mampu bersaing dengan daerah kabupaten / kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan mengekspor produk dari sektor basis ke luar pasar domestik, seperti hasil dari subsektor perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit yang berupa *Latex (sheet kering)* dan CPO yang di ekspor ke luar daerah untuk diolah kembali.

Hasil perhitungan analisis sektor basis perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai periode 2012 - 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini

Tabel 1

Nilai LQ Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Harga Konstan 2010 Periode 2012-2016

| Lapangan Usaha | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** |
|----------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,7175 | 1,7220 | 1,7184 | 1,7258 | 1,7148 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,7630 | 0,6566 | 0,6688 | 0,6661 | 0,6690 |
| 3 | Industri Pengolahan | 0,9460 | 0,9559 | 0,9675 | 0,9580 | 0,9571 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,7499 | 0,8185 | 0,8130 | 0,8646 | 0,8519 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,1301 | 0,1308 | 0,1312 | 0,1312 | 0,1304 |
| 6 | Konstruksi | 0,7283 | 0,7341 | 0,7319 | 0,7358 | 0,7557 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Senda Motor | 0,8097 | 0,8211 | 0,8226 | 0,8265 | 0,8347 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,1833 | 0,1840 | 0,1875 | 0,1884 | 0,1893 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,3979 | 1,3695 | 1,3825 | 1,3507 | 1,3445 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,2640 | 0,2663 | 0,2679 | 0,2540 | 0,2533 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,1513 | 0,1510 | 0,1603 | 0,5897 | 0,1677 |
| 12 | Real Estart | 0,5855 | 0,5881 | 0,5897 | 0,5891 | 0,5895 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,5490 | 0,5515 | 0,5538 | 0,5531 | 0,5510 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial waiih | 0,8906 | 0,1446 | 0,9017 | 0,9013 | 0,9042 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,7107 | 0,7155 | 0,7163 | 0,7235 | 0,7247 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,9700 | 0,9572 | 0,9605 | 0,9575 | 0,9620 |
| 17 | Jasa lainnya | 0,9514 | 0,9705 | 0,9748 | 0,9772 | 0,9842 |

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai (data di olah)

Analisis Skalogram

Perkembangan Infrastruktur dalam Pembangunan Wilayah

Infrastruktur (sarana dan prasarana) pada suatu wilayah sangat mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Wilayah yang infrastrukturnya baik akan lebih berkembang, sedangkan wilayah yang infrastrukturnya kurang baik relatif tertinggal. Sektor unggulan yang akan diprioritaskan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan wilayah akan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung aktivitas perekonomian wilayah.

Pusat pertumbuhan dan pelayanan dalam suatu wilayah akan memberikan keuntungan pada wilayah tersebut tersebut. Keuntungan berupa adanya konsentrasi yang lebih dalam memproduksi suatu komoditi hasil dari sektor perekonomian tertentu, terciptanya kemudahan-kemudahan hubungan antara daerah dalam pendistribusian komoditi, misalnya aksesibilitas transportasi relatif murah dan mudah dan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya pusat pertumbuhan dan pelayanan di kota kecamatan diharapkan mampu memberikan peranan dan fungsi yang sesuai dengan basis ekonomi wilayah. Penggunaan metode skalogram bertujuan untuk mengetahui hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan yang disebabkan penyebaran sarana dan prasarana pembangunan. Apabila sarana dan prasarana yang dimiliki suatu wilayah mempunyai jumlah jenis dan jumlah unit yang lebih banyak maka akan memberikan hirarki yang lebih tinggi. Sebaliknya apabila jumlah jenis dan jumlah unit prasarana yang dimiliki sedikit maka akan memberikan hirarki yang lebih rendah.

Unit pusat pengembangan yang di analisis dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Tabel lampiran 5 akan menyajikan jumlah jenis dan jumlah unit sarana dan prasarana pembangunan atau fasilitas sosial ekonomi pada setiap kecamatan (pusat pengembangan) yang disusun secara skalogram. Berdasarkan Tabel lampiran 5 diberikan informasi tentang hirarki atau peringkat dari pusat pengembangan dari peringkat teratas sampai peringkat terbawah seperti terlihat pada Tabel

Tabel 2

Hirarki Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015
Berdasarkan Skalogram (satuan unit)

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Jenis Fasilitas | Jumlah Unit Fasilitas | Peringkat |
|----|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | Sei Rampah | 43.676 | 37 | 1432 | 1 |
| 2 | Benai | 31.539 | 29 | 519 | 2 |
| 3 | Kuantan Mudik | 30.019 | 32 | 467 | 3 |
| 4 | Singingi Hilir | 30.133 | 29 | 434 | 4 |
| 5 | Kuantan Hilir | 25.970 | 29 | 421 | 5 |
| 6 | Singingi | 23.459 | 30 | 379 | 6 |
| 7 | Pangean | 16.276 | 27 | 283 | 7 |
| 8 | Cerenti | 13.148 | 28 | 258 | 8 |
| 9 | Gunung Toar | 13.327 | 27 | 189 | 9 |
| 10 | Logas Tanah Darat | 17.094 | 27 | 187 | 10 |
| 11 | Inuman | 17.951 | 24 | 158 | 11 |
| 12 | Hulu Kuantan | 7.568 | 18 | 78 | 12 |

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 bahwa hanya Kecamatan Sei Rampah yang memiliki fasilitas yang lengkap. Kecamatan Sei Rampah memiliki 37 jenis fasilitas. Kecamatan Sei Rampah merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya, sehingga kelengkapan fasilitas sangat diperlukan. Selain itu juga Kecamatan Sei Rampah merupakan ibukota Kabupaten Serdang Bedagai sehingga memungkinkan kecamatan ini memiliki fasilitas yang tidak dimiliki kecamatan lainnya. Disusul oleh Kecamatan Benai dengan 29 fasilitas. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Benai merupakan Kecamatan yang dekat dengan ibukota Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Teluk Kuantan Kecamatan Sei Rampah dan jumlah penduduknya berada pada peringkat dua paling banyak.

Kecamatan Hulu Kuantan merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas yang paling sedikit yaitu 18 fasilitas, ini disebabkan karena Kecamatan Hulu Kuantan merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya. Selain itu, Kecamatan Hulu Kuantan merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Mudik, kecamatan ini masih tergolong baru dan masyarakatnya masih relatif kurang maju dibandingkan masyarakat di kecamatan lain di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil analisis skalogram Kecamatan Sei Rampah memegang peringkat pertama dalam ketersediaan fasilitas pembangunan yaitu 1.432. ini disebabkan karena Kecamatan Sei Rampah merupakan ibukota dari Kabupaten Serdang Bedagai sehingga penyebaran fasilitas pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut. Hirarki terendah dipegang oleh Kecamatan Hulu Kuantan yaitu dengan jumlah fasilitas 78, selain karena jumlah penduduknya yang sedikit, Kecamatan Hulu Kuantan merupakan daerah baru dari hasil pemekaran Kecamatan Kuantan Mudik.

Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yang dekat dengan ibukota Kabupaten kelengkapan fasilitasnya dinilai baik dibandingkan kecamatan yang terletak jauh dari ibukota kabupaten seperti Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Inuman. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebaiknya mengambil kebijakan perbaikan fasilitas dan penambahan pembangunan fasilitas

penunjang perekonomian dan pembangunan terutama di wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi pusat pemerintahan.

Umumnya jumlah penduduk sebagai indikator dalam alokasi fasilitas pembangunan. Namun, dari hasil skalogram selain jumlah penduduk, jumlah desa menentukan alokasi fasilitas pembangunan. Hasil analisis ini diperlukan untuk mendukung hasil analisis sektor basis, sehingga sektor basis yang akan dikembangkan pada suatu wilayah dapat berkembang baik dengan dukungan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Perbedaan jumlah dan jumlah unit fasilitas sosial ekonomi yang dimiliki oleh tiap kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan memberikan peranan yang sesuai dalam menunjang pembangunan wilayah dan perekonomian masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

Perkembangan Infrastruktur Pendukung Sektor Unggulan

Tabel

Penyebaran Sarana dan Prasarana Pendukung Perkembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 (satuan unit)

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Fasilitas | Jumlah Fasilitas | Peringkat |
|----|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | Sei Rampah | 43.676 | 10 | 164 | 1 |
| 2 | Benai | 31.539 | 7 | 85 | 2 |
| 3 | Singingi Hilir | 30.133 | 9 | 84 | 3 |
| 4 | Kuantan Hilir | 25.970 | 8 | 77 | 4 |
| 5 | Kuantan Mudik | 30.019 | 11 | 72 | 5 |
| 6 | Singingi | 23.459 | 9 | 68 | 6 |
| 7 | Pangean | 16.276 | 7 | 66 | 7 |
| 8 | Cerenti | 13.148 | 7 | 60 | 8 |
| 9 | Inuman | 17.951 | 5 | 51 | 9 |
| 10 | Gunung Toar | 13.327 | 5 | 45 | 10 |
| 11 | Logas Tanah Darat | 17.094 | 7 | 44 | 11 |
| 12 | Hulu Kuantan | 7.568 | 7 | 41 | 12 |

Sumber: BPS (diolah)

Hasil analisis skalogram Kecamatan Sei Rampah memegang peringkat pertama dalam ketersediaan fasilitas pendukung sektor unggulan yaitu 164. Ini disebabkan karena Kecamatan Kuantan Tengah merupakan ibukota dari Kabupaten Serdang Bedagai sehingga penyebaran fasilitas pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut. Walaupun di Kecamatan Sei Rampah hanya terdapat tiga perusahaan pertanian, tetapi memiliki jumlah koperasi yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain nya Hirarki terendah dipegang oleh Kecamatan Hulu Kuantan yaitu dengan jumlah fasilitas 41. Kecamatan Hulu Kuantan mempunyai dua perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan, tetapi kecamatan ini masih berada pada peringkat terakhir, hal ini disebabkan karena fasilitas pendukung yang lainnya masih kurang, selain itu jumlah penduduknya yang sedikit dapat mempengaruhi ketersediaan dan penyebaran sarana dan prasarana yang ada di setiap kecamatan.

Tabel 4
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2015 (dalam km)

| Jenis Permukaan | Jalan Kabupaten | | |
|-----------------|-----------------|----------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Aspal | 265,73 | 285,82 | 312,36 |
| Kerikil | 687,94 | 724,44 | 1.328,55 |
| Tanah | 928,72 | 917,32 | 300,23 |
| Total | 1.882,40 | 1.927,59 | 1.941,15 |

Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kuansing dalam Angka 2015

Tabel 5
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai 2013 - 2015 (dalam km)

| Jenis Permukaan | Jalan Kabupaten | | |
|-----------------|-----------------|----------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Baik | 402,66 | 459,25 | 543,78 |
| Sedang | 890,66 | 1.175,21 | 1.275,50 |
| Rusak | 589,07 | 293,12 | 121,87 |
| Total | 1.882,40 | 1.927,59 | 1.941,15 |

Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kuansing dalam Angka 2015

Prasarana jalan yang berfungsi sebagai penunjang perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya dalam peningkatan sektor unggulan di setiap kecamatan agar dapat menyebar merata dan dapat mengirim hasil dari sektor unggulan tersebut seperti hasil dari komoditi pertanian dan pertambangan baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan arus transportasi yang lancar.

Implikasi Kebijakan

a. Kebijakan Pembangunan Sektoral

Berdasarkan *Klassen Typologi* klasifikasi pola pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai menjadikan sektor pertambangan dan penggalian berada pada kuadran I yaitu sebagai sektor yang maju dan berkembang cepat, sektor pertanian berada pada kuadran II yaitu sektor maju tetapi tertekan. Setelah dianalisis pola pertumbuhan sektor ekonomi, dapat diketahui klasifikasi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai, untuk lebih dalam lagi diperlukan analisis sektor basis dengan metode LQ untuk mencari sektor basis yang dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan. Sesuai dengan hasil analisis basis ekonomi dengan metode LQ untuk tingkat Kabupaten Serdang Bedagai diketahui ada dua sektor utama yang merupakan sektor basis perekonomian. Kedua sektor tersebut adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Jadi, dari kedua analisis *Klassen Typologi* dan *LQ* dapat disimpulkan bahwa sektor perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai yang harus dikembangkan dan dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian.

Untuk itu kebijakan pembangunan wilayah dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai diprioritaskan pada dua sektor tersebut, karena kedua sektor ini sangat berperan penting dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu, kedua sektor tersebut sebagai sektor basis juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan wilayah

Kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa implikasi kebijakan dari setiap sektor adalah sebagai berikut:

- 1) Implikasi kebijakan dari sektor pertanian diharapkan dapat membantu masyarakat petani dengan adanya penyebaran perusahaan pertanian dan Penyuluh Praktek Lapang untuk dapat membantu masyarakat petani khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian di setiap kecamatan. Peran swasta dalam mengelola hasil pertanian khususnya di bidang perkebunan agar dapat memberi bantuan kepada masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.
- 2) Sektor pertanian dapat menghasilkan nilai tambah dan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dan berkembang dengan dilakukannya usaha pertanian yang berwawasan bisnis, dengan dikembangkannya agribisnis dan agrowisata di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu juga agroindustri sebagai subsistem agribisnis yang mempunyai potensi sebagai pendorong pasar yang lebih luas dan nilai tambah (*value added*) yang besar. Mengembangkan sistem ketahanan pangan dan gizi melalui peningkatan ketersediaan komoditas pangan dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan kualitas yang baik. Selain itu, dengan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global yang mampu bersaing dengan daerah lain dengan memprioritaskan produk-produk unggulan pertanian baik dari tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan. Kebijakan lain yang bisa dilakukan misalnya dengan lebih meningkatkan teknologi intensifikasi pertanian dan diversifikasi pertanian.
- 3) Kebijakan dari subsektor kehutanan diharapkan dapat menjadikan dan mengembangkan perhutanan sosial sebagai penyeimbang ekosistem dan pelestarian lingkungan khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara umumnya. Dengan adanya perhutanan sosial tersebut dapat meminimalisasi penebangan hutan secara liar dan kebakaran hutan diberbagai daerah.
- 4) Implikasi Kebijakan dari sektor pertambangan di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dengan mendorong tumbuh dan kembangnya usaha dibidang pertambangan umum, energi, dan sumberdaya mineral. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan dengan tersedianya data pertambangan umum secara akurat dan valid, serta perlu adanya kegiatan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat atau pemerintah daerah sendiri dengan diadakannya diklat / kursus teknis bidang pertambangan agar potensi sumberdaya alam yang ada tidak di sia - sia kan dan hanya diberikan kepada investor yang ada atau perusahaan saja yang mengelola. Pengetahuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia juga diperlukan untuk pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan tidak merusak lingkungan serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang ahli dibidang pertambangan, mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan dan penggalian melalui peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan produksi dan penganekaragaman hasil tambang termasuk upaya pengelolaan untuk komoditas tambang, eksplorasi sumberdaya mineral, penyelidikan bahan galian dan sebagainya.
- 5) Dengan adanya implementasi kebijakan dari sektor pertambangan juga diperlukan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan agar terwujudnya pertambangan rakyat secara tertib. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat harus di data secara valid agar tidak merugikan masyarakat sekitar daerah pertambangan tersebut. Khususnya

tambang emas yang ada di Kecamatan Singingi masih dikelola oleh masyarakat setempat dan belum ada peranan dari swasta. Dengan kata lain, tambang emas yang ada di kecamatan tersebut masih illegal, belum ada kerjasama pemerintah dengan pihak swasta agar sumberdaya ini dapat dikelola dengan baik. Selain itu juga agar terwujudnya pertambangan rakyat secara tertib dengan tidak merusak lingkungan sekitar daerah pertambangan. Untuk itu, diharapkan investor yang bisa menanamkan modalnya di sektor pertambangan emas ini, dan tentunya dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan saling menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Serdang Bedagai, serta penyerapan tenaga kerja di perusahaan - perusahaan pertambangan tersebut.

- 6) Perkembangan dan pertumbuhan sektor unggulan pertanian dan pertambangan perlu didukung oleh sektor lainnya yang merupakan sektor non basis, sehingga selain dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan sektor unggulan tersebut juga dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan sektor lainnya yang merupakan sektor non basis sehingga menunjang keberadaan sektor basis, seperti adanya sektor industri pengolahan akan mendukung pengolahan hasil pertanian dan pertambangan, begitu juga dengan sektor non basis lainnya.

b. Kebijakan Menurut Penyebaran Fasilitas Pembangunan dan Pendukung Sektor Unggulan

Berdasarkan hasil analisis dari metode skalogram, penyebaran sarana dan prasarana pembangunan wilayah dan mendukung perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai dapat dikatakan belum mengalami pemerataan. Hal ini bisa terlihat di beberapa daerah di Kecamatan Hulu Kuantan (Desa Kombu, Sungai Kelilawar, Sungai Pinang dll) daerah - daerah ini jalan penghubung ke desa tersebut yang belum diaspal, serta pendapatan dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam kebijakan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang sebaiknya berwawasann pembangunan wilayah dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan terpadu antar sektor. Dalam bentuk lain dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi yang tergolong basis harus mendapat prioritas utama. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila sarana dan prasarana fasilitas pendukung pembangunan lengkap. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu memperhatikan wilayah yang sarana dan prasarananya kurang lengkap seperti Kecamatan Hulu Kuantan yang memiliki potensi sektor unggulan yang baik, tetapi penyebaran dan ketersediaan sarana dan prasarana nya belum memadai.
- 2) Kebijakan dalam meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik/masyarakat untuk mendorong pemerataan pembangunan, percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan dengan adanya perencanaan tata ruang agar terwujudnya tata ruang kota dan desa sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan tata ruang agar tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan terkendalinya ruang kota dan desa secara optimal.
- 3) Pembangunan berkelanjutan juga harus mendapat perhatian serius dalam mengembangkan sekor unggulan. Keberlanjutan usaha – usaha ekonomi sector unggulan

- harus diiringi dengan pengelolaan pembangunan keseluruhan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada paradigma pembangunan berkelanjutan.
- 4) Adanya otonomi daerah menuntut daerah untuk dapat memperbesar PAD yang akan digunakan sebagai sumber dana pembangunan daerahnya. Sesuai dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai maka pembangunan dilaksanakan lebih mengutamakan pada pembangunan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai. sektor perekonomian yang dapat dikembangkan dan diprioritaskan menjadi sektor unggulan adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.
 - 5) Implikasi kebijakan dalam penyebaran sarana dan prasarana wilayah di setiap kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai yang belum sepenuhnya mengalami pemerataan, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti keadaan sarana dan prasarana wilayah kecamatan yang kurang merata untuk mendukung perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai, terutama bagi daerah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten dan daerah kecamatan baru hasil pemekaran. Seperti Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Inuman dan kecamatan lain yang belum ada sarana dan prasarana pendukung dari sektor unggulan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayahnya.
 - 6) Implikasi kebijakan fasilitas pendidikan untuk mendukung sektor unggulan dapat dilakukan dengan cara mendirikan dan menambah sekolah kejuruan yang bergerak dalam bidang pertanian dan pertambangan, hal ini diperlukan untuk menciptakan sumberdaya manusia dan pengetahuan masyarakat dini tentang pertanian dan pertambangan tersebut, agar tidak tertinggal dengan daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2005. Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. P4Wpress. Bogor.
- Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. UGM, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. BAPPEDA Serdang Bedagai. Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai. 2016. Kabupaten Serdang Bedagai dalam Angka 2016. BPS Serdang Bedagai.
- Budiharsono, Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Destrika, Elka. 2006. Skripsi. Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi PAD dan Komponen PAD Provinsi Jawa Barat. Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Manajemen. IPB. Bogor.
- Glasson, J. 1977. Pengantar Perencanaan Regional (terjemahan Paul Sitohang). LPFEUI, Jakarta.

- Hanafiah, T. 1988. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil dalam Rangka Pengembangan Wilayah Pedesaan. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Faperta IPB. Bogor.
- Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 79-88
- Jaenudin, D. 2007. Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat Tahun 1997-2005. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Manajemen. IPB. Bogor.
- Napitupulu, R. S., Saragih, J. R., Hutagalung, G., & Situmeang, R. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil Provinsi Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 75-84
- Nindyantoro. 2004. Kebijakan Pembangunan Wilayah: Dari Penataan Ruang Sampai Otonomi Daerah. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Saragih, B. S., Siregar, R. T., Manullang, M., & Matondang, S. (2020). Peranan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagori Nagur Usang Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 1-13.
- Silalahi, M., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2021). Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 16-28
- Simanullang, U. B., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2021). Hubungan Tingkat Pendapatan Dengan Faktor Sosial Ekonomi Serta Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Desa Huta Gurgur Kecamatan Dolok Sanggul. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 29-38
- Siregar, M. A. N., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit PTPN - IV Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Pembaangunan Wilayah Di Desa Kedai Damar Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Badagei. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 39 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.578>
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Boduose Media. Padang. Sumatera Barat
- Tadjoedin, M.Z, W. I. Suharyo, dan S. Mishra. 2001. Aspirasi terhadap ketidakmeraan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia. UNSFIR Working Paper-Jakarta.
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 135-148.
- Usya, N. 2006. Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB. Bogor.